

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.¹

Di Indonesia khususnya di Kota Malang, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kota Malang di datangi oleh perantau-perantau dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa yang salah satunya untuk menempuh pendidikan sehingga kepadatan pun semakin meningkat.²

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta. GIZ. Hlm. 9

² Parmin, *Tiap Bulan 4.000 Unit Motor Baru Masuk Kota Malang*, <http://surabaya.tribunnews.com> di akses pada tanggal 11 April 2017

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Kepadatan kendaraan bermotor tersebut pun tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di Kota Malang dari tahun ke tahun selalu bertambah sehingga tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya dengan membuka lahan parkir dengan menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir.

Kota Malang merupakan daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.³ Sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Malang mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir guna mengatasi masalah perpakiran tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir mengatakan bahwa Parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.

Mengingat kepadatan kendaraan bermotor di Kota Malang yang semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang,

³ Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 6

hal ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuka usaha parkir dan menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir. Sayangnya orang-orang yang menjadi juru parkir tersebut tidak semuanya melalui proses atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga banyak juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi yang biasa kita sebut dengan juru parkir liar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya juru parkir yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan ketentuannya. Salah satunya adalah tidak memasang tanda pengenalan di rompi yang dipakainya saat bertugas.⁴

Padahal, tanda pengenalan ini adalah satu-satunya benda yang bisa membuktikan kesahan petugas parkir.⁵ Selain itu, meskipun seseorang telah terdaftar sebagai Juru Parkir resmi, terkadang orang tersebut juga mengalihkan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir beserta perlengkapannya kepada orang lain.

Padahal berdasarkan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir hal tersebut tidak diperbolehkan.

Bunyi dari pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir adalah sebagai berikut :⁶

Pasal 15 :

- (1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan dan Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir.

⁴ Pengamatan penulis di lowokwaru selama bulan September 2016

⁵ Hayu Yuda P. *Ingin Tahu Kelakuan Nakal Juru Parkir di Kota Malang dan Langkah yang Diambil Pemerintah, Simak Ini* . www.suryamalang.tribunnews.com , diakses pada tanggal 11 April 2017

⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir pasal 15

- (2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Penunjukan dan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dapat diperbaharui.
- (4) Setiap petugas parkir yang telah diberikan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan rompi dan membawa surat penunjukan di dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihan surat penunjukan dinyatakan sebagai petugas parkir yang tidak sah atau tidak berhak.
- (6) Tata cara penerbitan surat penunjukan dan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Juru Parkir atau Petugas Parkir adalah Petugas yang secara resmi diangkat oleh Pemerintah Kota Malang untuk mengatur kendaraan yang di parkir. Kata resmi di atas dimaksudkan bahwa setiap Petugas memiliki Kartu Tanda Anggota Juru Parkir yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.

Dengan menjadi seorang juru parkir yang tidak sah berarti juru parkir tersebut tidak terdaftar di Dinas Perhubungan, otomatis juru parkir tersebut berada di luar pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan sehingga Juru Parkir tersebut terkadang mengenakan biaya retibusi sembarangan kepada Pengendara Kendaraan Bermotor yang parkir di tempat parkir tersebut dan juga tidak diberikan karcis sebagai bukti perjanjian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, juru parkir liar atau tidak resmi tersebut bisa saja lolos dari pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu pada kendaraan yang di parkir dimana kendaraan tersebut seharusnya adalah tanggung jawabnya. Padahal berdasarkan pasal 17 Peraturan Daerah No.4

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir menyatakan bahwa Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir tersebut harus diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir dimana bentuk, ukuran, dan warna karcis tersebut ditentukan oleh Walikota serta penggunaan fasilitas Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Selain itu, berdasarkan pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah No.4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir menyatakan bahwa Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dengan kata lain, orang yang mengusahakan suatu tempat sebagai lahan parkir atau disebut dengan Juru Parkir tanpa memiliki surat penunjukan atau Kartu Tanda Anggota Juru Parkir sesuai dengan ketentuan ataupun yang mengalihkan Kartu Tanda Anggota Juru Parkirnya kepada orang lain sesuai yang tertera pada pasal 15 Peraturan Daerah No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir dapat dikenakan sanksi dan hukuman kepadanya.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk dipatuhi agar kepatuhan terhadap hukum tersebut mengakibatkan terjadinya ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat dan sebaliknya ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan permasalahan. Oleh karena itulah, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia.

Dengan menjadi Juru parkir tanpa Kartu Tanda Anggota Juru Parkir dan seijin dari Pemerintah serta mengalihkan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir kepada orang lain

berarti sama saja melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir sehingga dapat mencemari nilai-nilai ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat dan akan mengakibatkan kekacauan .

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "EFEKTIVITAS PASAL 15 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR YANG BERKAITAN DENGAN KARTU TANDA ANGGOTA JURU PARKIR"

B. Rumusan Permasalahan

Adapun beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pasal 15 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir?
2. Apa saja dampak dari Juru Parkir yang melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir?
3. Bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada Juru Parkir yang melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pasal 15 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir
2. Untuk mengetahui dampak dari Juru Parkir yang melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang kepada Juru Parkir yang melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritik
 - a. Secara akademik peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pemerintahan daerah atau otonomi daerah khususnya terkait dengan efektivitas dan penerapan sanksi pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Pakrir

b. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan juga Pemerintah Kota Malang tentang efektivitas dan penerapan sanksi pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Pakir

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang seberapa efektif dan penerapan sanksi peraturan daerah di Kota Malang yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir serta diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai efektivitas dan penerapan sanksi suatu peraturan daerah yaitu pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk berkembangnya hukum yang lebih baik.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat mengenai Pengelolaan Tempat Parkir serta yang terutama mengenai efektivitas suatu peraturan daerah yaitu pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁷.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 17

1. Tipe Penelitian atau Pendekatan

Tipe penelitian atau pendekatan dalam penyelesaian masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang diartikan sebagai penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini dikaitkan dengan masalah sosial yang menitikberatkan dengan keberadaan juru parkir liar yang cukup meresahkan masyarakat Kota Malang. Selain itu pendekatan yuridis sosiologis juga didasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah wilayah Kota Malang. Alasan penulis memilih lokasi di wilayah Kota Malang adalah karena setiap tahunnya kepadatan kendaraan bermotor semakin meningkat sehingga kebutuhan akan tempat parkir juga meningkat. Karena adanya peningkatan kendaraan bermotor tersebut, tidak sedikit masyarakat yang menjadikan dirinya sebagai Juru Parkir. Tetapi berdasarkan pengamatan penulis yang kesehariannya melewati wilayah Kota Malang, penulis menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir tersebut. Selain itu, adapun fokus lokasi penelitian yang akan diwawancarai oleh Penulis adalah sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan Kota Malang

Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang di Jalan Raden Intan Nomor 1 Kecamatan Blimbing Kota Malang ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah Daerah untuk mengurus parkir di Kota Malang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang.

b. Area titik parkir di Wilayah Kota Malang.

Area titik parkir yang dimaksud adalah area titik parkir yang berada di bahu jalan baik yang parkir umum maupun khusus. Alasan penulis memilih lokasi area titik parkir dengan ketentuan di atas adalah parkir yang paling sering digunakan oleh pengendara kendaraan bermotor adalah parkir yang berada di bahu jalan. Adapun beberapa alamat lokasi penelitian titik parkir antara lain sebagai berikut :

1. Jalan Kawi Kec. Klojen (3Titik)
2. Jalan Tenes Kec. Klojen (2Titik)
3. Jalan L.A. Sucipto Kec. Blimbing (2 Titik)
4. Jalan Borobudur Kec. Blimbing (2 Titik)
5. Jalan Danau Bratan Kec. Kedungkandang (5 Titik)
6. Jalan Danau Sentani Raya Kec. Kedungkandang (2 Titik)
7. Jalan Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru (2 Titik)
8. Jalan M.T. Haryono Kec. Lowokwaru (1 Titik)

9. Jalan S. Supriadi Kec. Sukun (4 Titik)

3. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang hendak diperoleh berupa dokumen tertulis, rekaman informasi, wawancara serta pendapat lain yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pihak dari Dinas Perhubungan Kota Malang dan Juru Parkir yang berada di Area titik parkir di Wilayah Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing yang sesuai dengan ketentuan lokasi penelitian

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah serta artikel yang berupa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan. Adapun beberapa perundang-undangan yang digunakan antara lain Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang, Peraturan Daerah Kota Malang 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Data Tersier

Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan serangkaian Tanya jawab secara langsung kepada responden dengan sistematis. Dalam melaksanakan suatu teknik pengumpulan data ini, penulis menetapkan pihak terkait antara lain adalah Bapak Hary Dwi Yudianto, S.Psi sebagai Staf Bidang Perparkiran Seksi Pendataan Dinas Perhubungan Kota Malang dan 50 orang Juru Parkir di wilayah Kota Malang yaitu Asbar, Arifin, Arif, Chandra, Adi, Doni, Sarul, Agus, Arianto, Eko, Siso, Tarmono, Dimas, Ghoni, Adit, Handoko, Septiawan, Eka, Yusuf, Deni, Firman, Risky, Aji, Bagas, Bowo, Prayogi, Imam, Didit, Krisna, Tanto, Hariyanto, Rohmat, Hendro, Edi, Tomo, Irul, Wawan, Gusti, Budi, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan X11

Merupakan pengamatan langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan seberapa efektif pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Tempat Parkir. Penulis melakukan observasi pada sebagian besar wilayah Kota Malang yang mencakup 5 Kecamatan di Kota Malang antara lain Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun untuk menemukan beberapa Juru Parkir yang sekiranya bisa diwawancarai.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran

c. Internet

Yaitu teknik penelusuran data dari internet atau website resmi yang berkaitan dengan permasalahan untuk melengkapi data atau bahan hukum yang terkait.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang akan dibuat oleh penulis terdapat 4 Bab yang akan membantu penulis dan pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang diangkat oleh penulis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul skripsi serta menjadi dasar pengantar umum dalam memahami penulisan skripsi ini. Pada Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, , metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tinjauan tentang pengertian dan unsur-unsur efektivitas hukum, tentang pengertian dan macam-macam sanksi hukum, tentang pengertian parkir dan juru parkir, serta tentang pelaksana Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan termpat parkir yaitu Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi

Pamong Praja. Penjelasan dari teori-teori tersebut digunakan untuk membantu penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini berisikan uraian-uraian atau pembahasan dari pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang seberapa efektif pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berkaitan dengan Kartu Tanda Anggota Juru Parkir serta mengenai penerapan sanksi pasal 15 Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

4. BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.